

Pengantar

INTELEKTUALISME DAN POLITIK ULAMA ACEH DALAM ENSIKLOPEDI

Oleh: Prof. Dr. T. H. Ibrahim Alfian, MA^{*}

Penyebaran dan pengembangan pendidikan Islam yang telah mengemuka di Aceh sejak abad keenam belas tidak dapat dilepaskan dari peran ulama sebagai tokoh sentralnya. Ulama, terutama sekali di Aceh, tidak saja berperan sebagai tokoh agama atau cendekiawan moral, tetapi juga sebagai tokoh politik dan intelektual.

Perkembangan sejarah pengetahuan di Aceh tidak dapat dilepaskan dari dua pengaruh besar yang saling kait-mengait, yaitu dunia Islam dan dunia Melayu. Tokoh-tokoh besar telah lahir sejak abad ketujuh belas seperti Hamzah al-Fansury, Syamsuddin as-Sumatrany, Nuruddin Ar-Raniry, dan Abdurrauf as-Singkily. Tokoh-tokoh di atas dikenal sebagai perintis pengetahuan Islam dengan mengangkat aspek substansial dalam Islam dan merekonstruksikannya ke dalam dunia regional, dunia Melayu.

Adapun melalui sastra al-Fansury telah mampu mengembangkan pengalaman rohani yang banyak itu ke dalam bentuk kesadaran komunikasional yang dapat diterima publik. Kajian yang dikembangkan bukanlah halusinasi subjektif, tetapi dapat diobjektivasi terutama dengan kerangka kajian semiotika dan linguistik. Bantuan terbesarnya ada pada pengembangan bahasa, tidak hanya sebagai media komunikasi tutur tetapi juga sebagai struktur pengetahuan tulis.

Peran ini dapat kita lihat melalui pengembangan bahasa Melayu

^{*} Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

yang memang sudah indah dan berstruktur itu menjadi lebih gemilang lagi. Perumpamaan atau alegori, puntuasi, dan gramatika bahasa yang terbawa di dalam “Syair Perahu” nyatanya berkembang lebih sempurna, melalui tangan-tangan kreatif penyair Melayu di abad ke-18. Dapat dibayangkan jika tidak ada peran imajinatif sang maestro Hamzah al-Fansury yang menuliskannya satu abad sebelumnya, tentu tidak ada yang bersisa dari sejarah indah yang bernilai susastra. Praktik inilah yang terus dikonsumsi ketika kita mengembangkan pengetahuan yang berbasiskan bahasa dan ternyata juga berperan dalam pembentukan identitas rumpun Melayu (sekedarnya diketahui tokoh ini hidup di akhir abad keenam belas hingga awal abad ketujuh belas). Dialah yang menulis “Syair Perahu”, meta-frasa bagi seluruh pengembaraan gagasan sufistik. Syair-syair itu digubah oleh penyair-penyair Melayu abad 18 dan dianggap sebagai karya terbaik pertama dalam bahasa Melayu.

Ensiklopedi yang ada di hadapan pembaca budiman sekarang ini adalah biografi pemikiran para ulama Aceh pasca abad ke-17 dan ke-18. Ketokohan para perintis pemikiran Islam itu telah cukup bersemi di mata dan hati kita. Paling tidak nama mereka menjadi inspirasi kesejarahan yang sedang kita pupuk hingga hari ini. Banyak institusi yang melekatkan nama mereka sebagai tanda ingatan dan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Namun, sedikit sekali di kalangan cendekiawan Aceh sekarang mengenal utuh pemikiran para ulama di bumi Serambi Mekah, padahal setiap kurun, Aceh terus saja menghasilkan ulama yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi. Mereka itulah ulama-ulama Aceh modern yang hidup di akhir abad 19 hingga penghujung abad 20 yang dicatat dalam buku ini.

Jika dipertimbangkan secara rasional, seharusnya gagasan-gagasan para ulama abad duapuluh ini lebih mudah diakses karena dengan makin sempurnanya industri cetak dan tersebarnya tulisan hingga ke masyarakat awam. Akan tetapi, akibat tidak adanya keberlangsungan diskusi, dengan mudah kita melupakannya.

Adapun dalam hal proses ke arah pengorganisasian pemerintah daerah yang didaulat undang-undang sebagai peletak dasar Syariat Islam melalui konsep Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah tantangan terkini bagi para ulama di IAIN Ar-Raniry khususnya. Namun, pengisian pemikiran yang berasal dari akar-akar kesejarahan

Pengantar

dan kebudayaan Aceh belum lagi lengkap karena diperlukan upaya serius dalam menggali lebih jauh referensi pemikiran para tokoh ulama Aceh di masa yang lalu.

Adapun pada tahun 1970-an hingga 1980-an, wacana pemikiran Islam masih cukup kental dalam mendiskusikan problem-problem sosial-keagamaan di Aceh. Contohnya, fatwa Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh (Dista) yang membolehkan pertunjukan *Barzanji* oleh Bengkel Teater Rendra di depan Mesjid Raya, *Bayt ar-Rahman* pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional tahun 1981 sungguh merupakan terobosan yang cukup radikal pada masanya. Sebagai informasi, ketika W.S. Rendra belum lagi memeluk agama Islam, dan banyak pemain *Barzanji* yang non-Muslim. Dalam kasus lain, perdebatan tentang Golkar dan Islam yang sempat memanaskan di Pemilu tahun 1987 juga mampu dilenturkan berkat pemikiran-pemikiran kreatif Tgk. H. Djakfar Hanafiah (tokoh yang tidak disebut dalam buku ini) dan Prof. H. Ali Hasjmy. Seperti diketahui, sebelum munculnya terobosan dari para ulama moderat, pemikiran Islam masyarakat Aceh secara keseluruhan masih kuat dengan hal-hal simbolik dan formalistik. Tgk. H. Djakfar Hanafiah misalnya, banyak membantu memecah kebekuan itu dengan berperan sebagai mediator antara negara dan masyarakat. Melalui ceramah-ceramah agamanya berkaitan program nasional Keluarga Berencana (KB) dan penggunaan alat kontrasepsi, ia mampu mengubah corak pemikiran mayoritas masyarakat Aceh yang ketika itu masih menganggap hal itu sebagai *haram* dan *bid'ah*. Perdebatan sungguh hidup dalam suasana dialogis dan *tasamuh* (toleransi) sehingga berefek pada munculnya banyak pemikiran ilmiah dan akademik yang sistematis dan terporos di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tak heran jika dalam sejarahnya, IAIN Ar-Raniry pernah dipuji sebagai satu dari tiga institusi tinggi keagamaan terbaik secara nasional setelah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebesaran nama IAIN yang terpusat di Jawa juga tak lepas dari kerja keras dua tokoh Aceh, yaitu: Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Prof. Dr. Tgk. Peunoh Daly yang mengembangkan gagasan multi-kulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negara yang tidak menjadikan agama sebagai asas politik nasionalnya.

Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh

Buku ini berisi narasi tentang 26 tokoh ulama Aceh dan merupakan ensiklopedi tentang pemikiran ulama Aceh yang paling lengkap sepanjang pengetahuan saya. Pemilihan para tokoh yang dimaksud oleh para penulis ensiklopedi ini cukup memenuhi syarat representasi, baik pengaruhnya maupun asal usul kedaerahannya. Ensiklopedi pemikiran ulama Aceh ini memberikan gambaran kepada kita bahwa para tokoh masih meneruskan *at-Turats al-Islamy* (tradisi kebudayaan lokal yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman) yang dirintis para ulama besar dua hingga tiga abad sebelumnya. Sebagian di antara mereka mengembangkan tradisi tarekat, sebuah proses pemurnian kesadaran Islam dengan cara-cara yang lebih luas dari praktik syari'at.

Paling tidak ada tiga ulama besar di abad ke-19 yang mengembangkan tradisi tarekat dan bersikap progresif terhadap sejarah kemanusiaan yang menantang saat itu. Mereka adalah Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Chik Di Tiro, dan Tgk. Chik Kuta Karang. Ketika tokoh ini dikenang sebagai penyair dan panglima perang. Mereka menggunakan *hikayat* atau *syair* sebagai basis penyebaran pengetahuan agama. Pada masa itu, pengenalan pengetahuan memang dirumuskan di dalam bentuk pantun atau syair, sebuah tradisi yang berkembang dan berangkat dari pengaruh Melayu. Pantun tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga edukasi, dan anjuran moral. Penyampaian dengan pesan-pesan agama menjadikannya energi organik untuk bergerak dan berjuang. Ketika seseorang mendengar syair-syair keagamaan yang dinarasikan dengan sempurna dan teruntai dalam kata-kata indah, maka tak mungkin menguraikannya lagi menjadi sikap setengah-setengah. Syair itu seumpama kredo iman yang menjadi motif perilaku yang tidak mungkin ditolak. Karena menolaknya berarti melemahkan iman dan menutup gairah yang telah terbakar oleh kata-kata magis itu. Jika kita mengenal *Hikayat Prang Sabi* (*Hikayat Perang Sabil/HPS*), maka ketiga tokoh ini adalah pelopor yang paling maju yang tidak boleh dilupakan.

HPS menjadi modal penting dalam perkembangan sastra Aceh di akhir abad sembilan belas hingga awal abad duapuluh. Meskipun secara keseluruhan *HPS* terlihat seperti plebisit perang, tak menutup kegemilangannya sebagai sumbangan narasi di bidang sastra dan pengetahuan. *HPS* adalah praktik wacana terbaik yang dilakukan oleh

Pengantar

para ulama saat itu untuk membentengi diri dari pengaruh kuasa asing yang mulai menular dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam hubungan luas dapat disimpulkan bahwa mulai kurangnya minat masyarakat Aceh saat itu untuk melawan kolonialisme Belanda tidak lain karena keberhasilan politik penundukan atas sistem budaya yang telah lestari selama ratusan tahun di masyarakat. Pengaruh kolonialisme Belanda yang didasarkan kepentingan ekonomi melahirkan kecendrungan hedonisme sekaligus “materialisme” di dalam kehidupan masyarakat. Secara perlahan ia menjadi polusi yang menggerogoti rasa kepercayaan diri rakyat, pasivisme, dan *ignorant* terhadap asal usulnya yang Islami dan Melayu. Secara luas ia merekonstruksi kesadaran masyarakat Aceh agar cemas melihat sejarahnya.

Lahirnya *HPS* menjadi resistensi kognitif atas kecendrungan kolonialisme yang melukai kebudayaan masyarakat. Jika ada analisis yang melihat *HPS* menjadi bagian alat perjuangan kelas untuk kepentingan tuan tanah dan *uleebalang*, yang ujung-ujungnya adalah tendensi ekonomis semata, tidak secara otomatis menutup kepada kesimpulan lain, bahwa *HPS* mampu menjadi alat komunikasi sekaligus sistem pengetahuan baru bagi masyarakat Aceh untuk lebih mengenal sejarah, budaya, dan agamanya. Di sinilah peran sentral wacana *HPS*, yaitu merekonstruksi wacana kekuasaan luar yang telah mendominasi dengan sub-kekuasaan baru, yaitu kekuasaan yang berangkat dari identitas diri sendiri. Sayang sekali, tidak banyak analis yang melihat peran sastra perang ini sebagai bagian dari gerakan dekonstruksi kekuasaan, seolah-olah ia hanya menjadi alat represi. Yang penting diingat lagi, tidak mungkin *HPS* dapat menjadi alat perubahan sosial jika ia hanya berisi diktum propaganda. Aspek artistik (terkait dengan formasi pantun atau syair) dan estetik (imajinasi yang melampaui kata-kata) turut berperan dalam membesarkan *HPS* sebagai karya sastra terpenting yang pernah ada dalam sejarah Aceh.

Maka dari itu, sebutan ulama kepada tokoh-tokoh di atas tidak cukup tepat dimaknai dalam perspektif Hegelian semata, yaitu sebuah unit sosial yang ada dalam sebuah komunitas dan melakukan peran persuasi dan komunikasi sepantasnya. Dalam gagasan Antonio Gramsci dan Edward W. Said, mereka dianggap intelektual sejati, yaitu orang yang mengambil

Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh

peran apa saja untuk mengentaskan keresahan yang ada di dalam masyarakatnya.

Penulisan ensiklopedi ini dapat merangsang daya pikir untuk menjadikan setiap pribadi untuk menjadi ulama, yang siap bertarung dengan permasalahan-permasalahan sosial-kebudayaan masyarakat secara kritis dan berdampak jelas. Secara etimologis, ulama memang dapat diartikan sebagai seorang yang berilmu dan mempraktikkan ilmunya. Keyakinan bahwa setiap orang Aceh adalah muslim dan mewarisi nilai-nilai keislaman dalam hidupnya, menjadi nilai plus bagi kita untuk mengambil cara lain berdasarkan disiplin pengetahuan di luar ilmu agama untuk menegaskan syiar Islam dan martabat pemeluknya (*'Izz al-Islam wa al-Muslimin*).

Buku ini telah terbit dan mungkin akan muncul berbagai macam tanggapan dari pembacanya. Tentu saja setiap penulisan buku ada saja politik wacana yang terjadi, dan itu tak lepas dari interest, minat, kekaguman, serta sistem ideologi yang membentuk pemikiran para editor buku ini untuk memilih tokoh-tokoh tertentu dan tidak memasukkan tidak memasukkan tokoh lainnya. Politik wacana, dapat kita simpulkan sebagai proses taksonomi dan klasifikasi, bukanlah sebuah kecelakaan ilmiah. Ia dapat menjadi energi positif untuk mendiskusikan keterpilihan dan ketidakterpilihan para tokoh di dalam wacana besar sosiologi pengetahuan ulama Aceh yang terus bergerak dinamis, merujuk kepada alasan Karl Mannheim.

Sebuah buku dapat dikatakan sukses jika ia mampu membuka perdebatan dan dialog lebih lanjut sehingga melahirkan buku-buku baru lagi. Unsur-unsur kebaruan selalu menjadi alasan untuk memudahkan buku yang telah ada. Itulah hukum sejarah pengetahuan. Ensiklopedi mungkin tidak sempurna dan memang seharusnya demikian. Ia menantang kita semua sebagai pembacanya untuk bergiat melahirkan ensiklopedi ulama versi baru atau edisi revisi, jika perdebatan itu sungguh-sungguh terjadi.

Tugas kita selanjutnya, marilah pertama-tama dengan rendah hati membaca hasil kerja yang telah disusun oleh para penulis yang rata-rata masih berusia muda ini dengan pikiran terbuka dan sikap ingin tahu. Keuntungan membaca tulisan dari kelompok muda adalah semangatnya yang besar untuk menyisipkan pesan-pesan pembaruan dalam setiap kata-

Pengantar

kata pilihannya. Para penulis muda ini tinggal menunggu waktu untuk menantang tanda-tanda zaman yang telah dibuatnya. Waktu jua dengan setia akan mencatatnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Referensi

Abdul Hadi W.M., *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-karya Hamzah al-Fansury* (Jakarta: Paramadina, 2001).

Antonio Gramsci, *Selection from the Prison's Notebooks*, 9th Printing, (New York: International Publisher, 1987).

Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Henry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Denys Lombard*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).

_____, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999).